

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

¹ Yohana Maria Viane Ina Laga
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Emaentu@gmail.com

² Muhammad Taufik Hidayat
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
putrataufiq69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa (1) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, (2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Dan (3) Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif. Studi ini menggunakan penyebaran kuisisioner, kemudian jawaban dari responden akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan program analisis regresi berganda dibantu dengan menggunakan data Statistical Product And Service Solution (SPSS 24). Dari 40 kuisisioner yang di distribusikan kepada responden, jumlah kuisisioner yang dikembalikan sebanyak 40 kuisisioner atau sebesar 100% kuisisioner yang dikembalikan. Dari 40 kuisisioner tersebut terdapat 10 kuisisioner atau sebesar 25% tidak dapat diolah dikarenakan pengisian jawaban pada kuisisioner tidak tertera secara lengkap dan terdapat jawaban ganda dari responden pada item pernyataan sehinggah hanya 30 kuisisioner atau sebesar 75% yang bisa diolah untuk menjadi data penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial pengawasan keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, (2) Secara parsial Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, (3) Secara parsial Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Kata Kunci : Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah

Abstract

The study aims to prove that (1) the impact of regional financial control on the performance of local governments, (2) the accountability influence on the performance of local governments, and (3) the transparency management of regional finances to the state government's performance of flores east.

The study was conducted in the east flores county inspector. The kind of research that was used was quantitative. The study USES the distribution of questionnaires, and then the answers of the respondents will be analyzed according to research needs by using the multiplying regression analysis program helped by statistical product and service solutions (SPSS 24). From the 40 questionnaires distributed to respondents, the number of questionnaires returned by 40 or 100%. The 40 questionnaires are 10 questionnaires or 25% inconclusive because the refilling of answers on the questionnaire is not in complete and there are double answers on the statement item until only 30 questionnaires or 75% of which can be treated for research.

As the result of research indicates that (1) partial financial supervision on the positive and significant performance of the local government of flores east, (2) in a partial accountability of financial management in the region affects positive and significant government performance in the eastern flores county, (3) partial transparency about the financial management of the east flores region has a positive and significant impact on the state government's east flores regional performance.

Keywords: surveillance, accountability, transparency, government performance

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik terhadap kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa menanggapi dengan lingkungan dan berupaya memberikan pelayanan yang baik, transparansi serta berkualitas dan juga harus adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah daerah tersebut.¹

Pada era globalisasi saat ini terdapat banyak isu tentang kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan publik karena belum terlihatnya hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat kembali menuntut para pemerintah daerah harus mempunyai kinerja yang baik dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan otonomi daerah. Kinerja pemerintah dinilai baik apabila dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Jika kinerja yang telah dilaksanakan dan mencapai hasil yang memuaskan itu harus sesuai dengan visi dan misi suatu kelompok atau organisasi yang sudah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sejajar dengan uang yang dikeluarkan untuk pelayanan program tersebut (Ihyaul, 2017 : 20). Maka dari itu kinerja lembaga pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan metode akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang baik. Dalam penerapan di berbagai macam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diharapkan untuk bisa mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. pada pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini untuk diharapkan agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.² Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih baik dan juga berkualitas.

¹Mardiasmo.(2009).*Akuntabilitas Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.² Wiguna, Yuniartha, Darmawan.(2015).*Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1).

Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan adanya manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan dalam perundang-undangan yang terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah yang berpihak kepada rakyat. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah ini sangatlah penting untuk dilaksanakan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya kesetaraan antara penyelenggaraan pemerintah daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah secara efektif dan efisien. (Wiguna 2015) Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan bisa menanggulangi kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara efektif.

Secara umum pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Wiguna 2015). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja seorang pegawai adalah kemampuan dan tujuan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukum, teladan pemimpin dan ketegasan. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan, jika adanya pengawasan yang baik dan tegas maka sesuatu pekerjaan itu akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan sesuai dengan ekspektasi. Semakin lancar kerja yang disertai dengan pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan menghasilkan yang baik pula.

Pada kantor Inspektorat Daerah di Kabupaten Flores Timur memiliki fungsi-fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah, dimana terdapat salah satu misi yang akan dicapai yaitu dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan manajemen pemerintah daerah. Disisi lain ada beberapa fungsi lainnya yaitu dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan. Ada dua asas yaitu Asas Dekonsentrasi dan Asas Desentralisasi. Asas Dekonsentrasi yaitu wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepada kepala wilayah atau kepala jabatan vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Dan asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka diperlukan tenaga

pengawasan atau pembantu pengawasan yang digunakan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.³

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya menetapkan dan menerapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada seluruh komponen yang ada didalam organisasi lingkup kerjanya untuk menaggungjawapi dan mengembangkan tugasnya sebaik mungkin. Maka dari itu harapan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan sehinggah bisa terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan. Berdasarkan peranan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur diatas maka, keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan jabatan atau instansi vertical dari badan pengawasan yang ditugaskan di Kabupaten sebagai aparat pengawasan umum. Dalam melakukan pengawasan tugas-tugas administratif dan operasional dibutuhkan yang namanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai jabatan vertical yang bertanggungjawab kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Namun permasalahan yang terjadi bahwa belum dilaksanakan secara efektif, mengapa karena pelaksanaan kinerja pemerintah selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dimana dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan tidak tepat pada waktunya, mengapa hal ini bisa terjadi karena disebabkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu juga dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi penyelewengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur.

Maka dari itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Inspektorat Daerah Kabupten Flores Timur sebagai lembaga pengawasan internal dibawah Bupati agar tidak terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran diperlukan akuntabilitas publik sehinggah kinerja pemerintah daerah bisa meningkat.

Di sisi lain akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam menjalankan atau melaksanakan akuntabilitas publik para pejabat pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan sampai pada pelaksanaan benar-benar harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Pemedagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan oleh

para pegawai yaitu penyusun anggaran ini sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya, karena selain butuh waktu untuk memahami sekaligus mempelajari. Kendala yang dialami tentang akuntabilitas berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan baik aturan itu turunan dari undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri hingga sampai pada saat ini belum diwujudkan. Tetapi para pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksanakan atau menindaklanjuti aturan yang ada. Jika hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi suatu temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang sedemikian cepat akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggungjawaban pada kegiatan.

Selain akuntabilitas tuntutan sektor publik yang dilakukan transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam hal memenuhi hak-hak publik dalam hal pengelolaan anggaran. Transparansi adalah memberikan informasi atau mengumumkan terbuka kepada masyarakat yang real dan jujur sesuai dengan perundang-undangan, Dengan yang dilakukan transparansi publik bisa memperoleh informasi yang aktual.³ Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah pelayanan publik dalam kinerja pemerintah tidak terlalu baik. Keluhan masyarakat yang berkaitan pelayanan publik mengenai kinerja pemerintah daerah masih sangat diprihatinkan. Penerapan transparansi ini disetiap perangkat daerah belum maksimal, karena banyak akses internet yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, jika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Maka dibutuhkan pemerintah yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah dikatakan transparan apabila penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menyeleksi dan mengevaluasi kinerja pemerintah⁴.

³Regina Tobi, Idayati.(2016).*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 8, Agustus 2016 ISSN : 2460-0585.⁴
<https://kupang.tribunnews.com/2019/11/14/apbd-flotim-2018-terburuk-sepanjang-sejarah-ampera-tuntut-kejaksanaan-periksa-ketua-dprd-dan-sekda>

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah pada setiap anggaran dan realisasi yang dicapai pada setiap kegiatan, pemerintah selalu menjelaskan kepada masyarakat yang sulit dicermati oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan pemerintah pada kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. (Menurut Regina Tobi, 2016)

Adapun permasalahan yang ingin dikajikan dalam penelitian ini adalah yang pertama Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Yang kedua Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ke empat Apakah pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : pertama Untuk mengetahui pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, kedua untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan ketiga untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis guna mendapatkan manfaat, diantaranya yaitu : Bagi pengembangan ilmu akademis diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan ilmu tentang akuntansi, lebih khususnya tentang pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, Bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang luas tentang kinerja pemerintah daerah terutama mengenai pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik yang bertautan dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

KAJIAN PUSTAKA

Definisih Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang atau kelompok.

Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 ayat 5) Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah hasil kerja dari

suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.⁵

Definisi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Rosi Permata Sari Sembiring (2020) dalam tata kelola pemerintah, transparansi dimana pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga bisa memudahkan pengamatan oleh masyarakat. Yang berarti bahwa lembaga pemerintah harus terbuka dalam melaksanakan suatu program pengambilan keputusan dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai organisasi.

Definisi Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dalam akuntansi sektor publik adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.⁶

Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam konteks pemerintahan akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju pemerintah yang bersih. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Kinerja Pemerintah,

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat. Menurut Setyanningrum (2017) pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

⁵ Bastiam, Indra, (2010).*Akuntansi Sektor Publik.Suatu Pengantar*.Penerbit Erlangga: Jakarta; ⁶ Bambang Jatmiko.(2020).*Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi Trisakti ISSN : 2339-0832 (Online) Volume.7 Nomor.2 September 2020 : 231-246 Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446> ; <https://theorykeuangan daerah.blogspot.com/2015/12/pengawasan-keuangan.html>.

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dalam perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.⁷ Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan yang adanya pengawasan keuangan daerah sehingga bisa mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang luar dugaan. Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, karena dengan adanya pengawasan kinerja pemerintah bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini secara langsung dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurut penelitian (purnama & Nadirsyah, 2016) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan penelitian (Putra, 2018) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hubungan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah, Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan yang berupa informasi, komunikasi bahkan dalam hal penganggaran kepada masyarakat yang nyata dan jujur sesuai dengan perundang-undangan. Secara langsung pemerintah daerah ingin mendapatkan penilaian dari masyarakat atas kinerjanya. Dengan ini bisa membuat pemerintah berupaya dalam menampilkan kinerja terbaiknya dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya.⁸

⁷ IrnaSetyanningrum.(2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta*. Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta; ⁸ Ait Novianti, Wedi, Diandra.(2019).*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis -Vol 10 No 1 Maret 2019

Selain dari penilaian masyarakat, penilaian dari pengawas juga akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk bisa berusaha menghasilkan kinerja yang terbaik sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurut penelitian Vivi Herlina & Helmi Edisa (2021) Aturan transparansi dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Di dalam tatakelola pemerintah, transparansi dimana pemerintah harus memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi sehingga bisa memudahkan pengamatan oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin baik kinerjanya dimata masyarakat.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam uji statistik. Data kuantitatif adalah pengujian data dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka untuk menjawab rumusan masalah, serta perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan apakah variabel bebas (Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah) berpengaruh terhadap variabel terikat (Kinerja Pemerintah Daerah). Secara parsial atau simultan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data yang dikumpulkan menggunakan metode angket yang artinya menyebarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang diisi dan wajib dijawab oleh responden pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang beralamat Puken Tobi Wangi Bao, Larantuka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang berjumlah 40 orang (Sumber bagian Administrasi Pegawai, 2021). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat melibatkan semua pegawai Inspektorat Kabupaten Flores Timur. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Di Inspektorat Daerah. Sampel yang di ambil sebanyak 40 pegawai pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

⁹ Purnama, Nadirsyah.(2016).*Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15.

Teknik pengumpulan pada data yang digunakan oleh penelitian ini adalah menggunakan angket. Angket adalah kuisioner yang digunakan dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden dan wajib dijawab, yaitu pegawai Pemerintah Daerah, dan Auditor setempat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Flores Timur ini meliputi: Statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil perhitungan statistik deskriptif terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai minimal yang diberikan responden sebagai jawaban atas pertanyaan dalam kuisioner adalah 2 dan nilai maksimal adalah 5. Nilai rata – rata sebesar 4.45 dan standar deviasi sebesar 0.69. Berdasarkan penilaian variabel pada tabel, nilai tersebut menunjukkan bahwa pengwasan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sangat baik.

Hasil perhitungan statistik deskriptif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan daerah (X2) menunjukkan bahwa nilai minimum adalah sebesar 3 dan nilai maksimum adalah 5. Nilai rata – rata adalah sebesar 4.45 dengan standar deviasi sebesar 0.60. Berdasarkan penilaian variabel pada tabel, nilai tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan daerah pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sangat baik

Hasil perhitungan statistik deskriptif terhadap variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) menunjukkan nilai minimal sebesar 4 dan nilai maksimal sebesar 5. Nilai rata –rata dan standar deviasi masing – masing sebesar 4.55 dan 0.56. Berdasarkan penilaian variabel pada tabel dibawah, nilai tersebut menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat baik

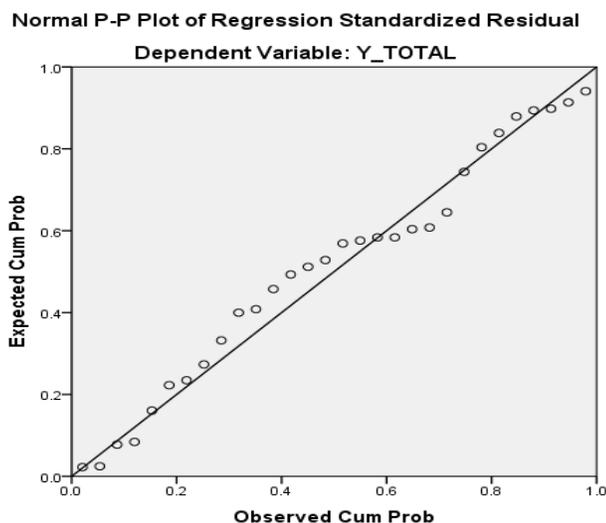
Hasil perhitungan statistik deskriptif terhadap variabel kinerja pemerintah daerah (Y) niali minimal adalah sebesar 3 dan nilai maksimal adalah sebesar 5. Nilai rata – rata dan standar deviasi mesing – masing adalah sebsar 4.39 dan 0.55. Berdasarkan penilaian variabel pada tabel, nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat baik.

Uji Asumsi Klasik

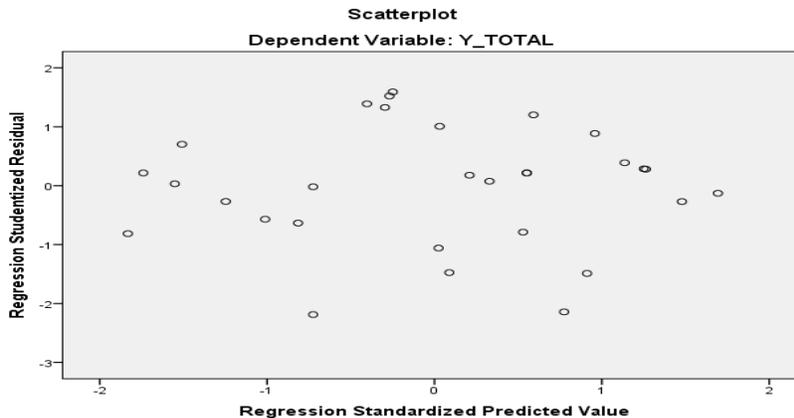
Uji asumsi klasik penelitian dilakukan dengan tiga macam pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterkedastisitas.

Uji Normalitas : Uji normalitas digunakan untuk melakukan uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, karena uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan berdistribusi normal. Uji normalitas juga untuk mengetahui tipe pengujian statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal maka digunakan pengujian statistik parametrik. Sedangkan, data tidak berdistribusi normal maka digunakan pengujian statistik non parametrik. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tampak bahwa data terdistribusi secara normal. Hal tersebut tampak dari gambar berikut ini.

Normal P – P Plot



Uji Heterokedastisitas : Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Jika terjadi gejala homoskedastisitas, berarti tidak terjadi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, sehingga variabel terikat benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. Uji gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan grafik plot (scatter plot). Jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas maka uji regresi tidak terkena asumsi heteroskedastisitas. Maka untuk mengetahui Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.



Scatter plot untuk Uji Heterokedestisitas

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			Tolerance
(Constant)	11.223	7.369		1.523	0.140	
X1_TOTAL	0.327	0.200	0.394	1.836	0.014	0.363
X2_TOTAL	0.623	0.220	0.624	2.837	0.009	0.436
X3_TOTAL	0.431	0.169	0.464	2.549	0.017	0.637
T tabel : 1.70329						

Beberapa hal yang dapat diketahui dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut : Konstanta intersep bernilai positif menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah (X1), akuntabilitas pengelolaan daerah (X2), dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (X3) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di inspektorat daerah. Koefisien regresi variabel X1, X2 dan X3 bertanda positive artinya variabel pengawasan keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positive terhadap kinerja pemerintah di inspektorat daerah. Setiap peningkatan pengawasan kauangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menaikkan pada kinerja pemerintah di inspektorat daerah. Koefisien variabel X1, X2 dan X3 bertanda positif artinya pengawasan keuangan daerah (X1), akuntabilitas pengelolaan daerah (X2), dan transparansi pengelolaan

keuangan daerah (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah di inspektorat daerah. Artinya peningkatan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menaikkan kinerja pemerintah di inspektorat daerah.

Uji t (Uji Parsial) : Uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Pada uji t jika t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_0 ditolak atau variabel x tidak berpengaruh terhadap variabel y. Namun sebaliknya jika t hitung lebih kecil daripada t tabel maka H_0 diterima. Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh hasil uji parsial sebagai berikut: Variabel X1, nilai t hitung adalah sebesar 1.836 dan nilai signifikansi sebesar 0.014. Artinya pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores. Variabel X2, nilai t hitung adalah sebesar 2.837, sedangkan nilai signifikansi adalah sebesar 0.009. Artinya akuntabilitas pengelolaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores. Variabel X3, nilai t hitung adalah sebesar 2.549 dan tingkat signifikansi adalah sebesar 0.017. Artinya variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t adalah sebesar 1.836 dan nilai signifikansinya sebesar 0.014. Dengan demikian semakin tinggi dan pengawasan keuangan daerah di setiap kerja perangkat daerah maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores Timur. Kedua Akuntabilitas pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 2.837 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,009. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di setiap kegiatan perangkat daerah maka akan bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Ketiga Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 2.549 sedangkan nilai signifikansinya adalah sebesar 0.017. Maka dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah kabupaten Flores Timur juga akan semakin lebih baik pula.

Saran

Pertama Untuk pemerintah kabupaten Flores Timur lebih meningkatkan lagi pengawasan keuangan daerah, sehingga hasil kinerja pemerintah kabupaten Flores Timur tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti pemborosan dan korupsi dalam hal pengelola keuangan. Kedua Untuk pemerintah kabupaten Flores Timur lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas, agar hasil dari kinerja pemerintah kabupaten Flores Timur dapat terlihat lebih nyata dalam segi pertanggungjawaban pemerintah yang berkualitas maka dari itu akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat kabupaten Flores Timur. Ketiga Kepada pemerintah kabupaten Flores Timur agar lebih meningkatkan lagi kinerja pemerintah melalui transparansi yang baik bagi penggunaan informasi atau masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah tetap handal dan akurat. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Keempat Untuk pemerintah kabupaten Flores Timur lebih ditingkatkan lagi kualitas kinerja pemerintah melalui pemeriksaan intern yang baik sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan daerah. Kelima Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survei melalui kuisisioner, melainkan ditambah dengan melakukan wawancara. Sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya terbatas dari kuisisioner yang telah diisi oleh para responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.(2009).*Akuntabilitas Sektor Publik*.ANDI:Yogyakarta
- Bastiam, Indra, (2010).*Akuntansi Sektor Publik.Suatu Pengantar*.Penerbit Erlangga: Jakarta
- Abdul Halim.(2016)*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.Penerbit Salemba Empat:Jakarta
- IrnaSetyanningrum.(2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta*. Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Yogyakarta
- Purnama, Nadirsyah.(2016).*Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten*

Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01- 15.

Bambang Jatmiko.(2020).*Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*. Jurnal Akuntansi Trisakti ISSN : 2339-0832 (Online) Volume.7 Nomor.2 September 2020 : 231-246 Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>

Ait Novianti, Wedi, Diandra.(2019).*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis -Vol 10 No 1 Maret 2019

Wiguna,Yuniartha,Darmawan.(2015).*Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1).

Regina Tobi, Idayati.(2016).*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 8, Agustus 2016ISSN : 2460-0585

<https://theorykeuangaerah.blogspot.com/2015/12/pengawasan-keuangan.html>.

<https://kupang.tribunnews.com/2019/11/14/apbd-flotim-2018-terburuk-sepanjang-sejarah-ampora-tuntut-kejaksaan-periksa-ketua-dprd-dan-sekda>